



## BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Jakarta, 3 Juli 2020

Nomor : S - 974 /K/JF/2020  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Rekomendasi Kebutuhan JFA pada  
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan  
Meranti

Yth. Bupati Kepulauan Meranti  
di Selatpanjang

Sehubungan surat Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 700/ITDA/II/2020/84 tanggal 5 Februari 2020 Perihal Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan JFA, dapat kami sampaikan rekomendasi kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	4	2	2
2	Auditor Madya	11	5	6
3	Auditor Muda	22	15	7
4	Auditor Pertama	44	30	14
	Jumlah	81	52	29

Penjelasan terhadap selisih lebih terlampir.

Surat Rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan yang dilampirkan dalam Surat Usulan Penetapan Kebutuhan PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bupati Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh  
NIP 19640809 198503 1 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

**PENJELASAN SELISIH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JFA  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

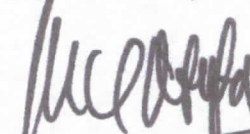
Terdapat selisih lebih antara jumlah kebutuhan JFA yang diusulkan dan rekomendasi yang kami berikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	4	2	2
2	Auditor Madya	11	5	6
3	Auditor Muda	22	15	7
4	Auditor Pertama	44	30	14
	Jumlah	81	52	29

Penjelasan terhadap selisih lebih tersebut disebabkan:

1. Perbedaan perhitungan jumlah penugasan pengawasan sebagai dasar perhitungan beban kerja.
2. Total beban kerja berdasarkan verifikasi dan validasi adalah sebanyak 10.400 HP, yang dihitung berdasarkan 160 kegiatan pengawasan dan menggunakan hari penugasan 50 HP. Dengan struktur gugus tugas 1:3:6 dan 5 hari kerja dalam satu minggu beban kerja tersebut masuk klasifikasi C2 (lima gugus tugas) dengan kebutuhan auditor sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dengan perincian 2 Auditor Utama, 5 Auditor Madya, 15 Auditor Muda, dan 30 Anggota Tim (Auditor Pertama).
3. Berdasarkan hal di atas dapat disampaikan:
  - Jumlah Auditor Utama yang diusulkan sebanyak 4 orang, melebihi dari yang seharusnya 2 orang.
  - Jumlah Auditor Madya yang diusulkan sebanyak 11 orang melebihi dari yang seharusnya 5 orang.
  - Jumlah Auditor Muda yang diusulkan sebanyak 22 orang melebihi dari yang seharusnya 15 orang.
  - Jumlah Auditor Pertama yang diusulkan sebanyak 44 orang melebihi dari yang seharusnya 30 orang.

Kepala BPKP,



Muhammad Yusuf Ateh  
NIP 19640809 198503 1 001